

## **PENERAPAN FUNGSI PENGORGANISASIAN DALAM ORGANISASI SEKTOR PUBLIK: STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA BOGOR**

Saprudin<sup>1</sup>, Muhammad Aria Fauzan<sup>2</sup>, M.Andi Alfiana<sup>3</sup>, Muhamad nushoir arrofih<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [saprudin@unida.ac.id](mailto:saprudin@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [arya300324@gmail.com](mailto:arya300324@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, [andialfiana987@gmail.com](mailto:andialfiana987@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Djuanda, [arrofih1@gmail.com](mailto:arrofih1@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas kinerja organisasi sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, fungsi ini berperan penting dalam mengatur sumber daya manusia, struktur kerja, serta mekanisme koordinasi guna mencapai tujuan pelayanan publik secara optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi pengorganisasian (organizing) pada Dinas Sosial Kota Bogor sebagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur terhadap buku manajemen publik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan struktur dan kinerja Dinas Sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan fungsi pengorganisasian di Dinas Sosial telah didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang relatif terdefinisi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program sosial tidak hanya ditentukan oleh struktur birokrasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, komunikasi antarbidang, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengorganisasian melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penyusunan prosedur kerja yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Bogor.

**Kata Kunci:** manajemen publik, pengorganisasian, Dinas Sosial, efektivitas organisasi, pelayanan publik

### **PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab strategis dalam melaksanakan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan umum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan proses

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2022). Dalam konteks tersebut, fungsi pengorganisasian memegang peranan penting karena berpengaruh langsung terhadap kejelasan pembagian tugas, koordinasi kerja, dan efektivitas pelaksanaan program serta kebijakan publik (Terry & Rue, 2021).

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur kerja, pembagian tugas, penetapan wewenang, serta pengaturan hubungan kerja antarindividu dan unit dalam organisasi (Ahyari & Nugroho, 2021). Terry dan Rue (2021) menjelaskan bahwa tujuan pengorganisasian adalah membentuk kerangka kerja yang sistematis agar seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan secara terkoordinasi dan terarah. Dalam konteks organisasi sektor publik, pengorganisasian tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan secara jelas, tepat, dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2021; Purnomo & Samudro, 2022).

Organisasi sektor publik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sehingga dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Dwiyanto, 2021). Salah satu fungsi manajemen yang menentukan keberhasilan organisasi sektor publik adalah fungsi pengorganisasian, yaitu proses pengaturan struktur kerja, pembagian tugas, penetapan wewenang, serta koordinasi antarunit dan aparatur guna mencapai tujuan organisasi secara optimal (Ahyari & Nugroho, 2021). Penerapan fungsi pengorganisasian yang baik memungkinkan organisasi publik melaksanakan program dan kebijakan secara terarah, meningkatkan koordinasi kerja, serta menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Purnomo & Samudro, 2022).

Dinas Sosial Kota Bogor sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan kelompok rentan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Dwiyanto, 2021). Kompleksitas tugas dan luasnya cakupan pelayanan sosial menuntut adanya pengorganisasian yang jelas dan terstruktur agar setiap bidang dan aparatur dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal (Keban, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya, organisasi sektor publik sering menghadapi berbagai tantangan dalam pengorganisasian, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarunit kerja, serta perlunya penyesuaian struktur organisasi terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Purnomo & Samudro, 2022; Wibowo, 2023).

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Sosial bertanggung jawab atas program kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kompleksitas tugas tersebut menuntut organisasi yang jelas, pembagian kerja yang proporsional, dan sistem koordinasi antarbidang yang efektif. Dwiyanto (2021) menyatakan bahwa organisasi publik yang tidak memiliki sistem pengorganisasian yang baik cenderung mengalami inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, dan pelayanan masyarakat yang buruk.

Prinsip *good governance* memiliki keterkaitan yang erat dengan pengorganisasian dalam sektor publik, karena pengorganisasian yang efektif akan menciptakan kejelasan peran, tanggung jawab, serta hubungan kerja antarunit organisasi, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien (Dwiyanto, 2021). Pengorganisasian yang baik menjadi sangat penting bagi instansi publik seperti Dinas Sosial, mengingat kompleksitas tugas pelayanan sosial, dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya aparatur, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan (Keban, 2020; Wibowo, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sektor publik, khususnya dalam aspek pengorganisasian sebagai fondasi efektivitas kinerja birokrasi. Penelitian ini penting karena dapat menjadi sarana evaluasi bagi Dinas Sosial Kota Bogor dalam mengoptimalkan pembagian tugas, struktur organisasi, serta mekanisme koordinasi kerja antarbidang guna mendukung pencapaian tujuan pelayanan sosial (Dwiyanto, 2021). Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi secara akademis dengan memperkaya kajian manajemen publik, terutama mengenai penerapan fungsi pengorganisasian dalam organisasi pemerintah daerah, serta memberikan rujukan praktis bagi instansi publik lain dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik (Keban, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis penerapan fungsi pengorganisasian dalam organisasi sektor publik dengan studi pada Dinas Sosial. Analisis ini berfokus pada elemen struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi, serta masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan efisiensi organisasi dan kualitas pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan fungsi pengorganisasian di Dinas Sosial Kota Bogor. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena

manajerial secara mendalam melalui penelaahan terhadap dokumen, struktur organisasi, serta proses kerja dalam organisasi sektor publik (Creswell & Poth, 2018; Dwiyanto, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup buku-buku manajemen dan administrasi publik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan struktur organisasi dan kinerja Dinas Sosial Kota Bogor. Data pendukung juga diperoleh dari laporan tahunan, hasil evaluasi internal, dan publikasi resmi yang tersedia melalui situs pemerintah (Keban, 2020). Teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis konten**, yaitu proses sistematis dalam menelaah, menginterpretasikan, dan mengategorikan informasi yang relevan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan program sosial (Krippendorff, 2019). Analisis dilakukan secara terstruktur untuk mengidentifikasi pola penerapan pengorganisasian, kendala yang dihadapi, serta peluang perbaikan dalam mendukung efektivitas organisasi. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian logis yang menggambarkan kondisi aktual organisasi sekaligus memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat efektivitas fungsi pengorganisasian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Bogor (Robbins & Coulter, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Fungsi Pengorganisasian dalam Organisasi Sektor Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi pengorganisasian di Dinas Sosial Kota Bogor secara formal telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi dan prinsip manajemen publik. Struktur organisasi yang bersifat fungsional memungkinkan pembagian tugas dan penetapan wewenang dilakukan secara jelas, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis di lapangan. Kejelasan struktur ini secara empiris membantu aparatur memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan program pelayanan sosial, seperti penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Temuan ini menguatkan pandangan Terry dan Rue (2021) bahwa pengorganisasian berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengoordinasikan seluruh aktivitas organisasi agar berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengorganisasian yang bersifat struktural belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas kerja lintas bidang. Dalam praktiknya, pelaksanaan program sosial yang memerlukan keterlibatan lebih dari satu bidang masih sering mengalami keterlambatan akibat perbedaan persepsi tugas, alur komunikasi yang belum terintegrasi, serta keterbatasan mekanisme koordinasi horizontal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan struktur formal belum otomatis menjamin efektivitas pengorganisasian secara substantif. Temuan tersebut sejalan dengan Dwiyanto (2021) yang

menegaskan bahwa tantangan utama organisasi sektor publik terletak pada kemampuan mengelola koordinasi internal dan kolaborasi antarfungsi secara berkelanjutan, terutama dalam lingkungan birokrasi yang kompleks.

### **Koordinasi, Komunikasi, dan Tantangan Implementasi**

Secara empiris, koordinasi di Dinas Sosial Kota Bogor telah diupayakan melalui berbagai forum formal, seperti rapat rutin antarbidang, evaluasi bulanan program, serta forum komunikasi lintas perangkat daerah. Mekanisme ini menunjukkan adanya kesadaran organisasi akan pentingnya koordinasi sebagai bagian integral dari fungsi pengorganisasian. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi tersebut masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemecahan masalah secara kolaboratif. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor, terutama ketika berhadapan dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat mendadak dan membutuhkan respons cepat di tingkat daerah.

Kondisi tersebut memperkuat pandangan Keban (2020) bahwa organisasi publik dituntut untuk memiliki sistem pengorganisasian yang adaptif dan fleksibel agar mampu merespons dinamika kebijakan dan tuntutan lingkungan eksternal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi, menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi fungsi pengorganisasian. Beban kerja yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan aparatur yang memadai, sehingga berpotensi menurunkan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program. Temuan ini sejalan dengan Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa kapasitas organisasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja pelayanan publik, khususnya dalam sektor sosial yang membutuhkan ketepatan, kecepatan, dan empati dalam pelayanan.

### **Implikasi Penguatan Fungsi Pengorganisasian**

Berdasarkan temuan empiris tersebut, penguatan fungsi pengorganisasian di Dinas Sosial Kota Bogor perlu diarahkan tidak hanya pada aspek struktural, tetapi juga pada penguatan proses dan kapasitas organisasi. Penyempurnaan mekanisme koordinasi lintas bidang perlu dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih operasional dan berbasis proses kerja nyata. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data dan komunikasi internal menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi koordinasi antarunit kerja.

Pelatihan lintas fungsi dan peningkatan literasi digital aparatur juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi struktur organisasi secara berkala diperlukan agar pengorganisasian tetap relevan dengan dinamika permasalahan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian tidak hanya berperan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

## KESIMPULAN

Fungsi pengorganisasian memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas manajemen publik di Dinas Sosial Kota Bogor. Meskipun struktur organisasi dan pembagian tugas telah ditetapkan dengan jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi lintas bidang, komunikasi internal, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengorganisasian perlu dipahami sebagai proses dinamis yang menuntut penguatan koordinasi, adaptabilitas terhadap perubahan kebijakan, serta dukungan sistem organisasi. Penguatan fungsi pengorganisasian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial, ketepatan pelaksanaan program, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

## REFERENSI

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). Strengthening organizational capacity in public service delivery. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jap.62145>
- Handoko, T. H. (2021). *Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*. Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2020). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Gava Media.
- Keban, Y. T. (2020). Bureaucratic reform and organizational effectiveness in public sector management. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(2), 89–102. <https://doi.org/10.22146/jkap.56543>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Dinas Sosial 2024*. Kemensos RI.
- Koontz, H., & Weihrich, H. (2020). *Essentials of management*. McGraw-Hill.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mintzberg, H. (2020). *The nature of managerial work*. Harper & Row.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (2021). *Reinventing government*. Addison-Wesley.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2022). *Management*. Pearson Education.
- Sedarmayanti. (2022). *Good governance dan reformasi birokrasi*. Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. (2021). *Manajemen pemerintahan*. Refika Aditama.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2021). *Principles of management*. McGraw-Hill.
- Wibowo, A. (2023). *Kinerja aparatur sipil negara dan manajemen pelayanan publik*.

Wibowo, A. (2023). Kapasitas organisasi dan kinerja pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 145–158.